



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PUPUK
NITROGEN, FOSFOR, DAN KALIUM PADAT SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta kelestarian lingkungan dari penggunaan pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium padat, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan daya saing efisiensi, dan kinerja industri pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium padat, dan telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium padat secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium padat dan kebijakan di bidang standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PUPUK NITROGEN, FOSFOR, DAN KALIUM PADAT SECARA WAJIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat yang selanjutnya disebut Pupuk NPK Padat adalah pupuk anorganik majemuk buatan berbentuk padat yang mengandung unsur hara makro utama nitrogen, fosfor, dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Pupuk NPK Padat dan berkedudukan di Indonesia.
5. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berkedudukan di Indonesia dan bertanggung jawab atas kegiatan impor Pupuk NPK Padat.
6. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Pupuk NPK Padat dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan dari pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.

9. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Pupuk NPK Padat sesuai ketentuan pemberlakuan SNI untuk Pupuk NPK Padat secara wajib.
10. Tanda SNI adalah tanda Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
12. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
13. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai pemberi kerja sama untuk memproduksi Pupuk NPK Padat dengan jenis/karakteristik produk yang sama dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
14. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Pupuk NPK Padat dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
15. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
16. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
17. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.

18. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
19. Surveilans adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
20. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
22. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk NPK Padat.
23. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
24. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI 2803:2024 untuk Pupuk NPK Padat secara wajib.
- (2) Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor pos tarif/*harmonized system ex*. 3105.20.00.
- (3) Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Pupuk NPK Padat secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Pupuk NPK Padat yang:
 - a. sifat teknisnya merupakan barang sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI; dan/atau

- c. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan dengan jumlah paling banyak 300 kg.
- (2) Pupuk NPK Padat untuk keperluan riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak digunakan untuk keperluan uji coba pasar.
- (3) Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk NPK Padat.
- (2) Pengecualian terhadap Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengecualian terhadap Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk NPK Padat.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pupuk NPK Padat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Pupuk NPK Padat secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB III PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Pupuk NPK Padat secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan:
 - a. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b; atau
 - b. sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. tinjauan permohonan; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.
- (5) Dalam hal penilaian kesesuaian dilakukan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap contoh barang Pupuk NPK Padat yang diambil setiap *lot/batch*.
- (6) Setiap *lot/batch* sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. untuk Pupuk NPK Padat hasil produksi Perusahaan Industri dalam negeri:
 1. total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan diproduksi menggunakan merek milik sendiri sesuai kapasitas terpasang Perusahaan Industri; atau
 2. total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan diproduksi berdasarkan pemesanan (*plan purchase order*) dengan menggunakan merek milik:
 - a) Perusahaan Industri lain atau Produsen di Luar Negeri dalam hal Kerja Sama Merek; dan/atau
 - b) Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri dalam hal Maklun.
 - b. untuk Pupuk NPK Padat hasil produksi Produsen di Luar Negeri.

1. total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan di ekspor menggunakan merek milik sendiri ke Indonesia pada setiap pengapalan (*shipment*); atau
2. total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (*shipment*) dengan menggunakan merek milik:
 - a) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri lain dalam hal Kerja Sama Merek; dan/atau
 - b) Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri dalam hal Maklun.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan/atau dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi sesuai atau setara dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal:
 - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tetapi telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau

- b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetapi jumlahnya belum memadai,

Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.

- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai lingkup SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b berlaku untuk Pupuk NPK Padat dengan jumlah tertentu sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch* produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (4) Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
- (5) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dimaklunkan atau dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.

Pasal 10

- (1) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diterbitkan dengan menggunakan merek milik sendiri dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Pupuk NPK Padat.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diterbitkan dalam hal terdapat Maklun dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
- (3) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Maklun.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diterbitkan dalam rangka Kerja Sama Merek dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
- (5) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dalam mengajukan sertifikasi SNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124;
 - b. memiliki merek sendiri untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu); dan
 - c. memiliki akun SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan sertifikasi SNI dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri juga harus:
 - a. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
 - b. memiliki fasilitas produksi untuk proses:
 1. pencampuran (*blending*) berupa peralatan pencampur (*mixer*);
 2. pencetakan (*compactor*) berupa peralatan pencampur (*mixer*) dan pembentuk (*compactor*);
 3. *prill* dengan peralatan peleleh (*melter*) dan menara *prill* (*prilling tower*);
 4. butiran (*steam granulation*) berupa peralatan pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), pendingin (*cooler*), penyaring (*screener*), dan pelapis (*coater*); atau
 5. kimia granulasi (*chemical granulation*) berupa peralatan pereaksi (*reactor*), pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), penyaring (*screener*), pendingin (*cooler*), dan pelapis (*coater*).

Pasal 12

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat;
 - b. memiliki merek sendiri untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu); dan
 - c. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
 - a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) dari Produsen di Luar Negeri;
 - c. menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;

- d. dapat bertindak dan berfungsi sebagai importir untuk Pupuk NPK Padat hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
 - e. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
 - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 - 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 - 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau
 - 3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (4) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
- a. melakukan kegiatan usaha industri pupuk; dan
 - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (5) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.
- (7) Dalam hal Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan sertifikasi SNI dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen di Luar Negeri juga harus:
- a. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
 - b. memiliki fasilitas produksi untuk proses:
 - 1. pencampuran (*blending*) berupa peralatan pencampur (*mixer*);
 - 2. pencetakan (*compactor*) berupa peralatan pencampur (*mixer*), dan pembentuk (*compactor*);
 - 3. *prill* dengan peralatan peleleh (*melter*), dan menara *prill* (*prilling tower*);
 - 4. butiran (*steam granulation*) berupa peralatan pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), pendingin (*cooler*), penyaring (*screener*), dan pelapis (*coater*); atau
 - 5. kimia granulasi (*chemical granulation*) berupa peralatan pereaksi (*reactor*), pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), penyaring (*screener*), pendingin (*cooler*), dan pelapis (*coater*).

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang didalam dokumen perizinan berusaha.
- (2) Alamat gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (2) huruf c menjadi alamat yang tertuang didalam sertifikat SNI dan SPPT SNI serta harus digunakan dalam pemasukan Pupuk NPK Padat asal impor, sebelum Pupuk NPK Padat diedarkan dan/atau dipindahtanggankan kepemilikannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak bertindak dan tidak berfungsi sebagai Importir:
 - a. Perwakilan Resmi hanya dapat menunjuk 1 (satu) perusahaan Importir untuk setiap permohonan Sertifikasi SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Perwakilan Resmi dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) perusahaan Importir untuk setiap permohonan Sertifikasi SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Perusahaan Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi untuk Pupuk NPK Padat.

Pasal 15

- (1) Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. bagi penerima Maklun:
 1. telah memiliki Sertifikat SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya sendiri dengan jenis Pupuk NPK Padat yang sama; dan
 2. mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Pupuk NPK Padat atas merek milik pemberi Maklun.
 - b. bagi pemberi Maklun:
 1. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha:
 - a) memiliki sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu); dan
 - b) memiliki akun SIInas.
 2. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri;

- a) memiliki sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu); dan
 - b) memiliki Perwakilan Perusahaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) harus memenuhi ketentuan:
 - a. ditunjuk oleh pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; dan
 - c. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (4) Pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan.
- (5) Dalam hal pelaku usaha di luar negeri mengganti Perwakilan Perusahaan sebelum masa berlaku Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

Pasal 16

Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya masing masing dengan jenis Pupuk NPK Padat yang sama;
- b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Pupuk NPK Padat atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.
- c. 1 (satu) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada paling banyak 2 (dua) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek dan/atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
- d. merek yang dikerjasamakan paling banyak hanya untuk 3 (tiga) merek.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.

- (2) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertindak dan berfungsi sebagai Importir, pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan Importir yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional
Indonesia

Pasal 18

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,
secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal terdapat Maklun atau Kerja Sama Merek, permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk merek yang dimaklunkan atau dikerjasamakan dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,
penerima Maklun atau Kerja Sama Merek secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi berbeda, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 19

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik sendiri dan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;

2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 5. daftar *lot/batch* rencana produksi Pupuk NPK Padat yang akan disertifikasi;
 - a) merek;
 - b) komposisi atau bentuk; dan
 - c) jumlah produk.
 6. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 20

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik sendiri dan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Pupuk NPK Padat

- atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
4. daftar *lot/batch* Pupuk NPK Padat yang akan di kirim pada setiap pengapalan;
 - a) merek;
 - b) nomor pos tarif;
 - c) komposisi atau bentuk; dan
 - d) jumlah produk.
 5. ilustrasi pembubuhan tanda SNI; dan
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
 - (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
 - a. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.

- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (4), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan Importir berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha; dan
 - c. bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 21

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan melalui sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Perusahaan Industri penerima Maklun harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. daftar *lot/batch* rencana produksi Pupuk NPK Padat dengan merek milik Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang akan disertifikasi;
 - a) merek;
 - b) komposisi atau bentuk; dan
 - c) jumlah produk.
 4. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;

- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dan/atau tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dimaklunkan; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun.
- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
 - a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
 - a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

- c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 - 1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat,kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 - 1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat,kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
 - 1. akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 - 2. perizinan berusaha;
 - 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas; dan
 - 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi,

atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 22

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan melalui sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Produsen di Luar Negeri penerima Maklun;
 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. daftar *lot/batch* Pupuk NPK Padat yang akan di kirim pada setiap pengapalan atau *shipment*;
 4. daftar *lot/batch* produk yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) nomor pos tarif;
 - c) komposisi atau bentuk; dan
 - d) jumlah produk.
 5. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dan/atau tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dimaklunkan; dan
 - e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
 - a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;

- b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk

- menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- e. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
1. salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 23

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan melalui sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;
 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 3. daftar *lot/batch* rencana produksi Pupuk NPK Padat dengan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang akan disertifikasi;
 - a) merek;
 - b) komposisi atau bentuk; dan
 - c) jumlah produk.
 4. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; dan
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dan/atau tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.

- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 1. Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat,

- kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
1. Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat,
- kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- f. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadap notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:

- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dan/atau tipe 5 (lima);
- b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
- d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
- e. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 24

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan melalui sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 3. daftar *lot/batch* Pupuk NPK Padat yang akan di kirim pada setiap pengapalan atau *shipment*;
 4. daftar *lot/batch* produk yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) nomor pos tarif;
 - c) komposisi atau bentuk;
 - d) jumlah produk; dan
 5. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dan/atau tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;

- c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:

- a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
- b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
- c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
- d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat;kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat,kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- f. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - 1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - 2. perizinan berusaha;
 - 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dan/atau tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 25

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik sendiri dan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan

kelas 1 (satu) milik Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- e. menggunggah dokumen pendukung lain berupa:
1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. daftar produk yang mencakup:
 - a) merek; dan
 - b) komposisi atau bentuk;
 8. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencampuran (*blending*) berupa peralatan pencampur (*mixer*);
 - b) pencetakan (*compactor*) berupa peralatan pencampur (*mixer*), dan pembentuk (*compactor*);
 - c) *prill* dengan peralatan peleleh (*melter*), dan menara *prill* (*prilling tower*);
 - d) butiran (*steam granulation*) berupa peralatan pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), pendingin (*cooler*), penyaring (*screener*), dan pelapis (*coater*); atau
 - e) kimia granulasi (*chemical granulation*) berupa peralatan pereaksi (*reactor*), pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), penyaring (*screener*), pendingin (*cooler*), dan pelapis (*coater*);
 9. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 10. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 11. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 12. struktur organisasi; dan
 13. proses bisnis.

- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelktual Kementerian Hukum Republik Indonesia dan sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Pupuk NPK Padat, sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4 dapat diganti dengan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 26

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik sendiri dan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelktual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh

- pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
6. diagram alir proses produksi;
 7. daftar produk yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) nomor pos tarif; dan
 - c) komposisi atau bentuk;
 8. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencampuran (*blending*) berupa peralatan pencampur (*mixer*);
 - b) pencetakan (*compactor*) berupa peralatan pencampur (*mixer*), dan pembentuk (*compactor*);
 - c) *prill* dengan peralatan peleleh (*melter*), dan menara *prill* (*prilling tower*);
 - d) butiran (*steam granulation*) berupa peralatan pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), pendingin (*cooler*), penyaring (*screener*), dan pelapis (*coater*); atau
 - e) kimia granulasi (*chemical granulation*) berupa peralatan pereaksi (*reactor*), pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), penyaring (*screener*), pendingin (*cooler*), dan pelapis (*coater*);
 9. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 10. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 11. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 12. struktur organisasi; dan
 13. proses bisnis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, angka 3, dan angka 4 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, angka 12 dan angka 13 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
- a. akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya;

- b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (4), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan Importir berupa:
- a. salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan
 - c. bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 27

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Perusahaan Industri penerima Maklun harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 4. diagram alir proses produksi;
 5. daftar produk yang mencakup:
 - a) merek; dan
 - b) komposisi atau bentuk;
 6. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencampuran (*blending*) berupa peralatan pencampur (*mixer*);
 - b) pencetakan (*compactor*) berupa peralatan pencampur (*mixer*), dan pembentuk (*compactor*);
 - c) *prill* dengan peralatan peleleh (*melter*), dan menara *prill* (*prilling tower*);
 - d) butiran (*steam granulation*) berupa peralatan pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), pendingin (*cooler*), penyaring (*screener*), dan pelapis (*coater*); atau
 - e) kimia granulasi (*chemical granulation*) berupa peralatan pereaksi (*reactor*), pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), penyaring (*screener*), pendingin (*cooler*), dan pelapis (*coater*);
 7. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 8. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 9. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan
 10. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dimaklunkan; dan

- e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun.
- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 - 1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

- d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 - 1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat,kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- e. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
 - 1. salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 - 2. perizinan berusaha;
 - 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 - 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 28

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,

Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Produsen di Luar Negeri penerima Maklun;
 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 4. diagram alir proses produksi;
 5. daftar produk yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) nomor pos tarif; dan
 - c) komposisi atau bentuk;
 6. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencampuran (*blending*) berupa peralatan pencampur (*mixer*);
 - b) pencetakan (*compactor*) berupa peralatan pencampur (*mixer*), dan pembentuk (*compactor*);
 - c) *prill* dengan peralatan peleleh (*melter*), dan menara *prill* (*prilling tower*);
 - d) butiran (*steam granulation*) berupa peralatan pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), pendingin (*cooler*), penyaring (*screener*), dan pelapis (*coater*); atau
 - e) kimia granulasi (*chemical granulation*) berupa peralatan pereaksi (*reactor*), pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), penyaring (*screener*), pendingin (*cooler*), dan pelapis (*coater*);
 7. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 8. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 9. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan
 10. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;

- d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dimaklunkan; dan
 - e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik pelaku usaha di luar negeri

- yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat,kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat,kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
 - 1. salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 - 2. perizinan berusaha;
 - 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 - 5. bukti kepemilikan akun SIINas.

- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 29

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;
 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 3. sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015;
 4. diagram alir proses produksi;
 5. daftar produk yang mencakup:
 - a) merek; dan
 - b) komposisi atau bentuk;
 6. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencampuran (*blending*) berupa peralatan pencampur (*mixer*);
 - b) pencetakan (*compactor*) berupa peralatan pencampur (*mixer*), dan pembentuk (*compactor*);

- c) *prill* dengan peralatan peleleh (*melter*), dan menara *prill* (*prilling tower*);
 - d) butiran (*steam granulation*) berupa peralatan pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), pendingin (*cooler*), penyaring (*screener*), dan pelapis (*coater*); atau
 - e) kimia granulasi (*chemical granulation*) berupa peralatan pereaksi (*reactor*), pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), penyaring (*screener*), pendingin (*cooler*), dan pelapis (*coater*);
 - 7. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 - 8. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 - 9. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan
 - 10. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.
- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang

- diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - 1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - 2. Perizinan berusaha;
 - 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 30

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;

- c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
 - 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - 3. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 - 4. diagram alir proses produksi;
 - 5. daftar produk yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) nomor pos tarif; dan
 - c) komposisi atau bentuk;
 - 6. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencampuran (*blending*) berupa peralatan pencampur (*mixer*);
 - b) pencetakan (*compactor*) berupa peralatan pencampur (*mixer*), dan pembentuk (*compactor*);
 - c) *prill* dengan peralatan peleleh (*melter*), dan menara *prill* (*prilling tower*);
 - d) butiran (*steam granulation*) berupa peralatan pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), pendingin (*cooler*), penyaring (*screener*), dan pelapis (*coater*); atau
 - e) kimia granulasi (*chemical granulation*) berupa peralatan pereaksi (*reactor*), pembentuk butiran (*granulator*), pengering (*dryer*), penyaring (*screener*), pendingin (*cooler*), dan pelapis (*coater*);
 - 7. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 - 8. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 - 9. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan
 - 10. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan

- e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan/atau perubahannya;
 - c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup

- kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
- c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat;kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat;kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - 1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - 2. Perizinan berusaha;
 - 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan,

memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan

5. bukti kepemilikan akun SIIInas.

- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 31

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e angka 4, Pasal 26 ayat (1) huruf e angka 4, Pasal 27 ayat (1) huruf e angka 3, Pasal 28 ayat (1) huruf e angka 3, Pasal 29 ayat (1) huruf e angka 3, dan Pasal 30 ayat (1) huruf e angka 3, harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 26 ayat (6) melakukan perubahan perusahaan Importir yang ditunjuk,

Perwakilan Resmi harus mengajukan perubahan data Importir pada Sertifikat SNI yang telah diterbitkan.

- (2) Pengajuan perubahan data Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas dengan melengkapi dokumen perusahaan Importir pengganti berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir;
 - c. bukti perjanjian sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Perubahan data Importir pada Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LSPro penerbit Sertifikat SNI.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 35

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan

telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.

- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Pasal 36

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu)
 - b, paling sedikit memuat:
 1. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
 2. nama petugas pengambil contoh;
 3. merek;
 4. komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;
 5. Laboratorium Uji yang digunakan;
 6. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya;
 7. jumlah produk yang disertifikasi; dan
 8. laporan hasil uji yang meliputi:
 - a) nomor dan judul SNI;
 - b) tanggal penerimaan contoh uji
 - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 - e) laporan hasil uji.
 - b. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), paling sedikit memuat:
 1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
 2. tanggal pelaksanaan audit kesesuaian;
 3. nama auditor;
 4. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
 5. nama petugas pengambil contoh;
 6. ringkasan hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;
 7. merek;
 8. komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;
 9. Laboratorium Uji yang digunakan;
 10. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 11. laporan hasil uji yang meliputi:
 - a) nomor dan judul SNI;
 - b) tanggal penerimaan contoh uji
 - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 - e) laporan hasil uji.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (5) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 38

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 39

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (3) LSPro membubuhkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada Sertifikat SNI.
- (4) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menerbitkan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik;
 - b. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
 - c. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.

Pasal 41

- (1) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dicantumkan informasi dengan ketentuan:
 - a. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 2. merek;
 3. nomor dan judul SNI;
 4. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 1 (satu) b;
 5. komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;
 6. jumlah produk yang disertifikasi;
 7. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 8. nomor *packing list*, tanggal, dan nomor *invoice* bagi Pupuk NPK Padat asal impor;
 - b. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), paling sedikit berisi:
 1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 2. merek;
 3. nomor dan judul SNI;
 4. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 5 (lima);
 5. komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;
 6. daftar Pupuk NPK Padat yang disertifikasi;
 7. penerapan atau kepemilikan sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015;
 8. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 9. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (2) Dalam hal Sertifikat SNI diterbitkan untuk Produsen di Luar Negeri, selain informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:

- a. nama dan alamat Perwakilan Resmi; dan
 - b. alamat gudang Perwakilan Resmi.
- (3) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi nama dan alamat perusahaan Importir yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (5) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 42

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat..
- (2) Skema sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

Pasal 43

- (1) Pupuk NPK Padat yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 44

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri; atau

- b. Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (4) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberlakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, SPPT SNI diterbitkan sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch* produksi atau setiap pengapalan/*shipment* untuk produk yang berasal dari impor; atau
 - b. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), SPPT SNI diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 - 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 - 2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.

- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI, Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. dalam hal penerima Maklun adalah Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
 2. dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produk tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau
 2. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 48

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk NPK Padat.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung.tim meminta pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) atau Pasal 47 ayat (1) untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.

Pasal 50

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dinyatakan:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 51

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49:
 - a. telah sesuai, lengkap, dan benar; atau
 - b. telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,

Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.

- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jumlah produk yang disertifikasi untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b; atau
 - d. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 52

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 53

- (1) Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada setiap kemasan terkecil dari Pupuk NPK Padat dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembubuhan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (3) Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat.
- (4) Skema sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Surveilen

Pasal 54

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI.
- (3) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.

- (4) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (5) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi dan/atau lembaga; atau
 - b. instruksi dari Menteri.
- (6) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 55

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
 - b. nama auditor;
 - c. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
 - f. nomor dan tanggal laporan hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.

Pasal 56

- (1) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (2) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
 - b. PPSI.

Pasal 57

- (1) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3):
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan
 - b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dinyatakan dokumen dan proses Surveilance belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal:
 - a. LSPro tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

Pasal 59

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dinyatakan dokumen dan proses Surveilance telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilance.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 60

LSPro yang tidak melakukan surveilance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal pada saat pengajuan penerbitan Sertifikat SNI, Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilance kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:
 - a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau

- b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Apabila pada saat surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

Pasal 62

- (1) Tata cara pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat.
- (2) Skema sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 63

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Pupuk NPK Padat dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Pupuk NPK Padat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Pupuk NPK Padat dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Pupuk NPK Padat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 64

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Pupuk NPK Padat sesuai dengan ketentuan SNI dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Pupuk NPK Padat hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Pupuk NPK Padat hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Pupuk NPK Padat yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada:
 - 1. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a;

2. Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b;
3. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a; atau
4. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b.

Pasal 65

- (1) Pupuk NPK Padat yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah habis masa berlakunya, Pupuk NPK Padat yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir.
- (2) Peredaran Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan:
 - a. untuk hasil produksi dalam negeri, Pupuk NPK Padat telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku;
 - b. untuk produk impor, Pupuk NPK Padat yang di impor telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku; dan
 - c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Pasal 67

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Pupuk NPK Padat secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Segala bentuk biaya yang timbul dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri dan/atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Dalam hal sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat hasil produksi dalam negeri atau impor harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 71

- (1) Pupuk NPK Padat yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
- (2) Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat beredar hingga pengguna akhir dengan ketentuan:
 - a. untuk Pupuk NPK Padat hasil produksi dalam negeri
 1. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, apabila telah produksi sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan

- terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku; atau
2. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), apabila telah produksi sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- b. untuk Pupuk NPK Padat hasil impor
1. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, apabila telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku; atau
 2. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), apabila telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 72

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perindustrian 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK NITROGEN,
FOSFOR, DAN KALIUM PADAT SECARA
WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK NPK PADAT

A. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk pelaksanaan sertifikasi awal, Surveilance, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI Pupuk NPK Padat secara wajib.

Adapun Pupuk NPK Padat yang diberlakukan wajib adalah Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system* (HS) ex. 3105.20.00.

B. ACUAN NORMATIF

Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:

1. SNI 2803:2024 untuk Pupuk NPK Padat; dan
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.

C. PROSEDUR SERTIFIKASI

Prosedur Sertifikasi dilakukan melalui kegiatan penilaian Kesesuaian dengan:

1. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b; dan/atau
2. sistem sertifikasi tipe 5 (lima).

Adapun tata cara memperoleh Sertifikat SNI dilakukan dengan tahapan:

1. Sistem Sertifikasi Tipe 1 (satu) b.

Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
TAHAP 1. SELEKSI			
1.	Permohonan		
	I.	Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri	
		A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.	
		B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi
		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124;	c. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d. surat pernyataan bermeterai yang	d. surat pernyataan bermeterai yang

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI yang dicetak dan diunggah melalui SIINas;	dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
		e. daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi Pupuk NPK Padat yang akan disertifikasi sesuai : 1) merek; 2) komposisi atau bentuk; dan 3) jumlah produk.	e. daftar <i>lot/batch</i> Pupuk NPK Padat yang akan di kirim (setiap pengapalan: 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) komposisi atau bentuk; dan 4) jumlah produk.
		f. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	f. ilustrasi pembubuhan tanda SNI; dan
			g. Dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
			1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya;
			2) perizinan berusaha;
			3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			4) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
			5) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
			6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; dan
			h. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan Importir berupa:
			1) salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya;
			2) perizinan berusaha; dan
			3) bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		Catatan-1: A. Sertifikat merk milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri), adalah: 1. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI; 2. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; atau 3. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut serta perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional atau perusahaan yang bergabung dalam 1 (satu) grup. 4. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) B. Untuk Perusahaan Industri. 1. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4. 2. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri Pupuk NPK Padat, maka: a. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4,	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		diganti dengan sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Pupuk NPK Padat merupakan pemilik dari Perusahaan Industri atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional; c. melengkapi perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan d. melengkapi bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perusahaan Industri, maka bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dapat diganti dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. C. Untuk Produsen di Luar Negeri 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf b, dan huruf c, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf f

NO	KETENTUAN	URAIAN
		diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. 3. Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi. 4. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi. 5. Perwakilan Resmi hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri. 6. Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan: a. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; b. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau c. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi. 7. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada Catatan-1, huruf C, angka 6, huruf a dan huruf b harus: a. melakukan kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat; dan b. memiliki saham di anak perusahaan. 8. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; 9. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 6) merupakan 1 (satu) alamat utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha. 10. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak dan tidak berfungsi sebagai Importir, maka Perwakilan Resmi hanya dapat menunjuk 1 (satu) perusahaan Importir untuk setiap permohonan Sertifikasi SNI. 11. Perusahaan Importir sebagaimana dimaksud pada Catatan-1, huruf C, angka 10 hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi untuk Pupuk NPK Padat. 12. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri, maka: a. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek

NO	KETENTUAN	URAIAN
		untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. melengkapi bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik dari Perwakilan Resmi; c. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 4) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan d. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 5) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 13. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi, maka: a. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Pupuk NPK Padat merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional. c. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 4), dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		d. bukti pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 5), diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 14. Dalam hal merek dimiliki oleh induk Perusahaan dan telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perwakilan Resmi, maka Perwakilan Resmi harus menyampaikan: a. bukti bahwa induk perusahaan industri Pupuk NPK Padat merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional; b. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 4), dan bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 5) dapat digantikan dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
	II. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
		A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
		B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
		4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
		b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;	b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
		c. daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi Pupuk NPK Padat dengan merek milik Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang akan disertifikasi sesuai : 1) merek; 2) komposisi atau bentuk; dan 3) jumlah produk.	c. daftar <i>lot/batch</i> Pupuk NPK Padat yang akan di kirim (setiap pengapalan) sesuai: 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) komposisi atau bentuk; dan 4) jumlah produk.
		d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		6. Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
		a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;	
		b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;	
		c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;	
		d. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan	Penerima Maklun adalah Produsen di

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Industri	Luar Negeri
		e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN		
		g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.		
		7. Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 5 huruf b berupa:		
		a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;		
		b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;		
		c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;		
			Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
			d. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	d. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			Intelektual Kementerian Hukum.
		e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
		f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
		g. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:	
		1) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;	
		2) perizinan berusaha;	
		3) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		5) bukti kepemilikan akun SIINas.
		Catatan-2: A. Untuk pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 1. Pelaku usaha di luar negeri harus memiliki Perwakilan Perusahaan. 2. Pelaku usaha di luar negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan. 3. Perwakilan Perusahaan hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri. 4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7 huruf a, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. B. Untuk Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun. 1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang: a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dan/atau tipe 5 (lima); b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut; d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dimaklunkan; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun. 2. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf d dimiliki oleh induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi: a. bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Pelaku Usaha pemberi Maklun atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional; b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; c. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf e, diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf f, diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri

NO	KETENTUAN	URAIAN
		penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf d telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi bukti pencatatan perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 4. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf d dimiliki oleh induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi: a. bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan Perwakilan Perusahaan atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional; b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; c. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf c dan huruf d, diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. d. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf e dan huruf f, diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf d telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi: a. bukti pencatatan perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		b. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf c dan huruf d dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada : 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan c. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana pada angka II, huruf B, angka 7, huruf e dan huruf f dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Makun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. C. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas.
	III. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
		A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
		B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:	
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri Penerima Kerja Sama Merek; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Apabila Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri	Apabila Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
		b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
		c. daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi Pupuk NPK Padat dengan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang akan disertifikasi sesuai : 1) merek; 2) komposisi atau bentuk; dan 3) jumlah produk.	c. daftar <i>lot/batch</i> Pupuk NPK Padat yang akan di kirim (setiap pengapalan) : 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) komposisi atau bentuk; dan 4) jumlah produk.
		d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; dan	d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		6. Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
		a.	bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
		b.	salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan/atau perubahannya;
		c.	perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
		d.	Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
			Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri
			Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
		e.	perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		e.	perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f.	bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada
		f.	bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.	
		7. Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
		a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;	
		b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	
		c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	
		d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Kerja Sama Merek adalah	Penerima Kerja Sama Merek adalah

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Perusahaan Industri	Produsen di Luar Negeri
		e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
		g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek	g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
			h. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
			1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
			2) perizinan berusaha;
			3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
			5) bukti kepemilikan akun SIInas.
		Catatan-3: A. Untuk Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 6, huruf d atau pada angka III, huruf B, angka 7, huruf c merupakan Sertifikat SNI yang: 1. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dan/atau tipe 5 (lima);	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		2. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; 3. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut; 4. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan 5. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. B. Untuk Perusahaan Industri Penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri Penerima Kerja Sama Merek. 1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang: a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dan/atau tipe 5 (lima); b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut; d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek. 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, huruf a dan huruf b, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 6, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi: a. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 6, huruf

NO	KETENTUAN	URAIAN
		e, dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 6, huruf f, dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 4. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, huruf h, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi: a. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, huruf d, dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, huruf e, dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi: a. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, huruf d dan huruf e, dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek

NO	KETENTUAN	URAIAN
		untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan b. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud angka III, huruf B, angka 7, huruf f dan huruf g, dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. C. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas.
		IV. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		V. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
		VI. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
		VII. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Kesesuaian dinyatakan batal.
		VIII. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		IX. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
		Catatan-4: A. Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, maka pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek. B. Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada Catatan-4, huruf A tidak bertindak dan berfungsi sebagai Importir, maka pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada Catatan-4, huruf A dapat dilakukan oleh perusahaan Importir yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Catatan-1, huruf b, angka 10.
2.	Tinjauan Permohonan	I. Dilakukan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan;
		II. Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima;
		III. Penugasan PPC dilakukan oleh LSPro.
3.	Petugas Pengambil Contoh	I. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
		II. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
		III. lancar berbahasa Indonesia;
		IV. memahami peraturan perundang-undangan terkait;
		V. telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
		VI. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Catatan-5: Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh dari laboratorium uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, maka persyaratan Petugas Pengambil Contoh mengacu kepada perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis.
4.	Laboratorium Uji Yang Digunakan	I. Laboratorium uji yang digunakan:
		A. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
		B. Laboratorium Uji di luar negeri.
		II. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
		A. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana tercantum dalam huruf B acuan normatif; dan
		B. ditunjuk oleh Menteri;
		III. Laboratorium Uji di luar negeri harus memiliki kemampuan melakukan pengujian Pupuk NPK Padat sesuai SNI Pupuk NPK Padat sebagaimana tercantum dalam huruf B acuan normatif dan memenuhi persyaratan:
		A. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
		B. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
		C. ditunjuk oleh Menteri.
		IV. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:
		A. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
		B. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
		C. lancar berbahasa Indonesia;
		D. memahami peraturan perundang-undangan; dan
		E. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.

NO	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP 2. DETERMINASI		
1.	Pengambilan Contoh	I. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.
		II. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh LSPro;
		III. Contoh uji wajib dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU);
		IV. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di tempat kedudukan dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, dengan ketentuan:
		A. untuk produksi dalam negeri, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di aliran produksi dan/atau di gudang produksi pada lokasi Perusahaan Industri. Setiap <i>lot/batch</i> hasil produk Pupuk NPK Padat di dalam negeri yang merupakan: 1. total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan diproduksi sesuai perizinan kapasitas Perusahaan Industri yang dimiliki dengan menggunakan merek milik sendiri; atau 2. total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan diproduksi berdasarkan pemesanan (<i>plan purchase order</i>) dengan menggunakan merek milik: a. Perusahaan Industri lain atau Produsen di Luar Negeri (dalam hal Kerja Sama Merek); dan/atau b. Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri (dalam hal Maklun).
		B. untuk produk impor, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di aliran produksi dan/atau gudang produksi pada lokasi Produsen di Luar Negeri. Setiap <i>lot/batch</i> untuk Pupuk NPK Padat luar negeri adalah: 1. total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (<i>shipment</i>) dengan menggunakan merek milik sendiri; atau 2. total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (<i>shipment</i>) dengan menggunakan merek milik:

NO	KETENTUAN	URAIAN
		a. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri lain (dalam hal Kerja Sama Merek); dan/atau b. Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri (dalam hal Maklun).
		V. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi diatur sesuai dengan ketentuan pada “Huruf F Ketentuan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat ini.
		VI. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		Catatan-6: A. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Perusahaan Industri sampai Sertifikat SNI diterbitkan. B. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Produsen di Luar Negeri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.
2.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian.	I. Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 2803:2024;
3.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI produk Pupuk NPK Padat.
TAHAP 3. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Hasil Uji	I. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait produk Pupuk NPK Padat;
		II. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji;
		III. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Pupuk NPK Padat;
		IV. Ketentuan untuk hasil uji: A. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang

NO	KETENTUAN	URAIAN
		tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
		B. jika hasil uji ulang (sesuai huruf A) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk jenis yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
		C. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;
		D. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro;
		E. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan (huruf D) tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau
		F. dalam hal 1 (satu) jenis memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk jenis tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).
		Catatan-7: A. jika hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi. B. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi terkait penilaian kesesuaian, pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
		A. Penerbitan Sertifikat SNI; atau
		B. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI (pernyataan gagal memenuhi persyaratan SNI).

NO	KETENTUAN	URAIAN
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	I. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan informasi hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas;
		II. Informasi hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka I paling sedikit berisi:
		A. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
		B. nama petugas pengambil contoh;
		C. merek;
		D. jenis Pupuk NPK Padat;
		E. Laboratorium Uji yang digunakan;
		F. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya;
		G. jumlah produk yang disertifikasi; dan
		H. laporan hasil uji yang meliputi:
		1. nomor dan judul SNI;
		2. tanggal penerimaan contoh uji;
		3. tanggal pelaksanaan pengujian;
		4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
		5. laporan hasil uji.
		III. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
		IV. Evaluasi sebagaimana dimaksud angka III meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
		V. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
		VI. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		VII. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		VIII. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		IX. Dalam hal LSPro:	
		A. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau	
		B. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,	
		Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.	
		X. Dalam hal:	
		A. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau	
		B. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,	
		Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.	
		XI. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.	
		XII. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.	
		XIII. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas.	
		XIV. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.	
		XV. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka XIV harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada angka XI oleh LSPro.	
		XVI. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		A. nama dan alamat Perusahaan Industri;	A. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
		B. merek;	B. merek;
		C. nomor dan judul SNI;	C. nomor dan judul SNI;
		D. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 1	D. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 1

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		(satu) b;	(satu) b;
		E. komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;	E. komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;
		F. jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan komposisi;	F. jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan komposisi;
		G. daftar produk Pupuk NPK Padat yang disertifikasi;	G. daftar produk Pupuk NPK Padat yang disertifikasi;
		H. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan	H. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
			I. nomor <i>packing list</i> , tanggal dan nomor <i>invoice</i> (bagi Pupuk NPK Padat asal impor);
			J. nama dan alamat Perwakilan Resmi;
			K. alamat gudang Perwakilan Resmi.
			L. nama dan alamat perusahaan Importir (dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir).
		XVII. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		A. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau	
		B. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
		XVIII. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		A. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau	
		B. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
TAHAP 4. LISENSI			
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	I.	Pupuk NPK Padat yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Badan.
		II. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		III. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh:
		A. Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri;
		B. Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri;
		C. Pelaku Usaha pemberi Maklun;
		D. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
		E. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
		F. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
		IV. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf A atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, harus:
		A. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		B. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
		2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka IV, huruf B, angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada angka IV, huruf B, angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		V. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat, Pelaku Usaha Pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf C atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf D, harus:
		A. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		B. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		1. dalam hal penerima Maklun adalah Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
		2. dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.
		Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka V huruf B angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada angka V huruf B angka 2 dikecualikan bagi Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		VI. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf E atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf F, harus:
		A. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		B. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		1. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau

NO	KETENTUAN	URAIAN
		2. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.
		Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka VI huruf B angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada angka VI huruf B angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		VII. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		VIII. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		IX. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
		A. Badan; dan
		B. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk NPK Padat.
		X. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
		A. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
		B. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		XI. Dalam hal:
		A. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
		B. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung.
		tim meminta pemohon SPPT SNI (Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri, Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun,

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek) untuk memberikan klarifikasi.
		XII. Pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada angka XI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		XIII. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.
		XIV. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada angka XIII:
		A. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
		B. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,
		Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
		XV. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		XVI. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan permohonan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada angka XIII:
		A. telah sesuai, lengkap, dan benar; atau
		B. telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,
		SPPT SNI akan diterbitkan oleh Kepala Badan.
		XVII. Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		XVIII. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		XIX. Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada angka XVIII memuat tautan elektronik yang berisi:
		A. informasi Sertifikat SNI;
		B. informasi produk; dan
		C. jumlah produk yang disertifikasi.
		XX. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

NO	KETENTUAN	URAIAN
		XXI. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik.
		XXII. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada setiap kemasan terkecil dan/atau kemasan pajangan (<i>Display Packaging</i>) dari Pupuk NPK Padat dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
		XXIII. Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada Lampiran I huruf E Skema Sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

2. Sistem Sertifikasi Tipe 5 (lima)

Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
TAHAP 1. SELEKSI			
1.	Permohonan		
	I. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri		
		A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.	
		B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi
		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124;	c. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO	d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		9001:2015;	9001:2015;
		e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f. diagram alir proses produksi;	f. diagram alir proses produksi;
		g. daftar produk yang mencakup:	g. daftar produk yang mencakup:
		1) merek; dan	1) merek;
		2) komposisi atau bentuk;	2) nomor pos tarif; dan
			3) komposisi atau bentuk;
		h. daftar fasilitas produksi untuk proses:	h. daftar fasilitas produksi untuk proses:
		1) pencampuran (<i>blending</i>) berupa peralatan pencampur (<i>mixer</i>);	1) pencampuran (<i>blending</i>) berupa peralatan pencampur (<i>mixer</i>);
		2) pencetakan (<i>compactor</i>) berupa peralatan pencampur (<i>mixer</i>), dan pembentuk (<i>compactor</i>);	2) pencetakan (<i>compactor</i>) berupa peralatan pencampur (<i>mixer</i>), dan pembentuk (<i>compactor</i>);
		3) <i>prill</i> dengan peralatan peleleh (<i>melter</i>), dan menara <i>prill</i> (<i>prilling tower</i>);	3) <i>prill</i> dengan peralatan peleleh (<i>melter</i>), dan menara <i>prill</i> (<i>prilling tower</i>);
		4) butiran (<i>steam granulation</i>) berupa peralatan pembentuk butiran (<i>granulator</i>), pengering (<i>dryer</i>), pendingin (<i>cooler</i>), penyaring (<i>screener</i>), dan pelapis (<i>coater</i>); atau	4) butiran (<i>steam granulation</i>) berupa peralatan pembentuk butiran (<i>granulator</i>), pengering (<i>dryer</i>), pendingin (<i>cooler</i>), penyaring (<i>screener</i>), dan pelapis (<i>coater</i>); atau

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		5) kimia granulasi (<i>chemical granulation</i>) berupa peralatan pereaksi (<i>reactor</i>), pembentuk butiran (<i>granulator</i>), pengering (<i>dryer</i>), penyaring (<i>screener</i>), pendingin (<i>cooler</i>), dan pelapis (<i>coater</i>);	5) kimia granulasi (<i>chemical granulation</i>) berupa peralatan pereaksi (<i>reactor</i>), pembentuk butiran (<i>granulator</i>), pengering (<i>dryer</i>), penyaring (<i>screener</i>), pendingin (<i>cooler</i>), dan pelapis (<i>coater</i>);
		i. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	i. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		j. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	j. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		k. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	k. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
		l. struktur organisasi; dan	l. struktur organisasi;
		m. proses bisnis.	m. proses bisnis; dan
			n. Dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
			1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya;
			2) perizinan berusaha;
			3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			4) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan

NO	KETENTUAN	URAIAN		
				bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
				5) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
				6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; dan
				o. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan Importir berupa:
				1) salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya;
				2) perizinan berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			3) bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		Catatan-1: A. Sertifikat merk milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri), adalah: 1. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI; 2. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; atau 3. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut serta perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional. B. Untuk Perusahaan Industri. 1. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4. 2. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Pupuk NPK Padat, pupuk buatan majemuk hara makro primer (KBLI 20123) dan/atau industri pupuk buatan campuran hara makro primer (KBLI 20124), sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 sebagaimana	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5 huruf d dapat diganti dengan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015. 3. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri Pupuk NPK Padat, maka: a. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Pupuk NPK Padat merupakan pemilik dari Perusahaan Industri atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional; c. melengkapi perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan d. melengkapi bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 4. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Perusahaan Industri, maka bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dapat diganti dengan: a. bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan b. bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Kementerian Hukum. C. Untuk Produsen di Luar Negeri. 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf b, huruf c, dan huruf d, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf k diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. 3. Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi. 4. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi. 5. Perwakilan Resmi hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri. 6. Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan: a. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; b. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau c. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi. 7. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada Catatan-1, huruf C, angka 6, huruf a dan huruf b harus: a. melakukan kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat; dan b. memiliki saham di anak perusahaan. 8. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; 9. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka

NO	KETENTUAN	URAIAN
		5, huruf m, angka 6) merupakan 1 (satu) alamat utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha. 10. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak dan tidak berfungsi sebagai Importir, maka Perwakilan Resmi dapat menunjuk sebanyak banyaknya 2 (dua) perusahaan Importir untuk setiap permohonan Sertifikasi SNI. 11. Perusahaan Importir sebagaimana dimaksud pada Catatan-1, huruf C, angka 10 hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi untuk Pupuk NPK Padat. 12. Dalam hal Perwakilan Resmi melakukan perubahan perusahaan Importir yang ditunjuk, Perwakilan Resmi harus mengajukan perubahan data Importir pada Sertifikat SNI yang telah diterbitkan. 13. Pengajuan perubahan data Importir, dilakukan melalui SIINas dengan melengkapi dokumen perusahaan Importir pengganti berupa: a. salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya; b. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U); c. bukti perjanjian sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Perubahan data Importir pada Sertifikat SNI, dilakukan oleh LSPro penerbit Sertifikat SNI. 15. Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI (sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima)) berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya. 16. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri, maka: a. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. melengkapi bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik dari

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Perwakilan Resmi; c. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf m, angka 4) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan d. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf m, angka 5) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 17. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi, maka: a. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Pupuk NPK Padat merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional. c. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf m, angka 4), dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan d. bukti pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf m, angka 5), diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 18. Dalam hal merek dimiliki oleh induk Perusahaan dan telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Perwakilan Resmi, maka Perwakilan Resmi harus menyampaikan: a. bukti bahwa induk perusahaan industri Pupuk NPK Padat merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional; b. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf m, angka 4), dan bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf m, angka 5) dapat digantikan dengan: 1) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 2) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. D. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf d adalah sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh: 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
	II. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar	

NO	KETENTUAN	URAIAN	
	negeri pemberi Maklun.		
		A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.	
		B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:	
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Produsen di Luar Negeri penerima Maklun;
		b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;	b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
		c. sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015;	c. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
		d. diagram alir proses produksi;	d. diagram alir proses produksi;
		e. daftar produk yang mencakup:	e. daftar produk yang mencakup:
		1) merek; dan	1) merek;
		2) komposisi atau bentuk	2) nomor pos tarif; dan
			3) komposisi atau bentuk;
		f. daftar fasilitas produksi untuk proses:	f. daftar fasilitas produksi untuk proses:
		1) pencampuran (<i>blending</i>) berupa peralatan pencampur (<i>mixer</i>);	1) pencampuran (<i>blending</i>) berupa peralatan pencampur (<i>mixer</i>);

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		2) pencetakan (<i>compactor</i>) berupa peralatan pencampur (<i>mixer</i>), dan pembentuk (<i>compactor</i>);	2) pencetakan (<i>compactor</i>) berupa peralatan pencampur (<i>mixer</i>), dan pembentuk (<i>compactor</i>);
		3) <i>prill</i> dengan peralatan peleleh (<i>melter</i>), dan menara <i>prill</i> (<i>prilling tower</i>);	3) <i>prill</i> dengan peralatan peleleh (<i>melter</i>), dan menara <i>prill</i> (<i>prilling tower</i>);
		4) butiran (<i>steam granulation</i>) berupa peralatan pembentuk butiran (<i>granulator</i>), pengering (<i>dryer</i>), pendingin (<i>cooler</i>), penyaring (<i>screener</i>), dan pelapis (<i>coater</i>); atau	4) butiran (<i>steam granulation</i>) berupa peralatan pembentuk butiran (<i>granulator</i>), pengering (<i>dryer</i>), pendingin (<i>cooler</i>), penyaring (<i>screener</i>), dan pelapis (<i>coater</i>); atau
		5) kimia granulasi (<i>chemical granulation</i>) berupa peralatan pereaksi (<i>reactor</i>), pembentuk butiran (<i>granulator</i>), pengering (<i>dryer</i>), penyaring (<i>screener</i>), pendingin (<i>cooler</i>), dan pelapis (<i>coater</i>);	5) kimia granulasi (<i>chemical granulation</i>) berupa peralatan pereaksi (<i>reactor</i>), pembentuk butiran (<i>granulator</i>), pengering (<i>dryer</i>), penyaring (<i>screener</i>), pendingin (<i>cooler</i>), dan pelapis (<i>coater</i>);
		g. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	g. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		h. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	h. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		i. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan	i. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan
		j. proses bisnis.	j. proses bisnis.
		6. Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
		a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;	
		b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;	

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;	
		d. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
		e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan

NO	KETENTUAN	URAIAN		
				bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.		
		7. Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 5 huruf b berupa:		
		a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;		
		b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;		
		c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;		
			Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
			d. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian	d. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Hukum;	untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
		e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
		f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		g. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		1) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
		2) perizinan berusaha;
		3) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		5) bukti kepemilikan akun SIINas.
		Catatan-2: A. Untuk pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 1. Pelaku usaha di luar negeri harus memiliki Perwakilan Perusahaan. 2. Pelaku usaha di luar negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan. 3. Perwakilan Perusahaan hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri . 4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7 huruf a, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 5. Dalam hal pelaku usaha di luar negeri mengganti Perwakilan Perusahaan sebelum masa berlaku Sertifikat SNI (sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima)) berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya. B. Untuk Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun. 1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 4 merupakan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Sertifikat SNI yang: a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut; d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dimaklunkan; dan e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun. 2. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf d dimiliki oleh induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi: a. bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Pelaku Usaha pemberi Maklun atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional; b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; c. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf e, diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Kementerian Hukum; d. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf f, diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf d telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi: a. bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan b. bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 4. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf d dimiliki oleh induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi: a. bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan Perwakilan Perusahaan atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional; b. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; c. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf c dan huruf d, diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. d. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf e dan huruf f, diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat; 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk

NO	KETENTUAN	URAIAN
		menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf d telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi: a. bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan b. bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. c. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf c dan huruf d dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan d. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana pada angka II, huruf B, angka

NO	KETENTUAN	URAIAN
		7, huruf e dan huruf f dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. C. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas. D. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 5, huruf c adalah sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh: 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
	III. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
		A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
		B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
		4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Industri penerima Kerja Sama Merek atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
		b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
		c. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	c. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
		d. diagram alir proses produksi;	d. diagram alir proses produksi;
		e. daftar produk yang mencakup:	e. daftar produk yang mencakup:
		1) merek; dan	1) merek;
		2) komposisi atau bentuk;	2) nomor pos tarif; dan
			3) komposisi atau bentuk;
		f. daftar fasilitas produksi dan/atau perakitan;	f. daftar fasilitas produksi dan/atau perakitan;
		g. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	g. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		h. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	h. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		i. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan	i. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		j. proses bisnis.	j. proses bisnis.
		6. Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
		a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan/atau perubahannya;	
		c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
		e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia;	e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia;
		f. bukti pencatatan perjanjian lisensi	f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari

NO	KETENTUAN	URAIAN
		dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
		g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
		7. Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 5 huruf b berupa:
		a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
		b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
		d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama

NO	KETENTUAN	URAIAN		
		Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;		
			Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
			e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
			f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia;	
			Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
			g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi	g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
		h. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:	
		1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;	
		2) perizinan berusaha;	
		3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	
		4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	
		5) bukti kepemilikan akun SIInas.	
		Catatan-3:	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		A. Untuk Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 6, huruf d atau pada angka III, huruf B, angka 7, huruf c merupakan Sertifikat SNI yang: 1. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); 2. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; 3. belum berakhir masa berlakunya atau tidak dibekukan; belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut; 4. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan 5. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. B. Untuk Perusahaan Industri Penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri Penerima Kerja Sama Merek. 1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang: a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; c. belum berakhir masa berlakunya atau tidak dibekukan; belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut; d. tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek. 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, huruf a dan huruf b, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 6, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi: a. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 6, huruf e, dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 6, huruf f, dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 4. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka

NO	KETENTUAN	URAIAN
		7, huruf h, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi: a. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, huruf d, dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, huruf e, dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:

NO	KETENTUAN	URAIAN
		a. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 7, huruf d dan huruf e, dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan b. bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud angka III, huruf B, angka 7, huruf f dan huruf g, dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. C. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas. D. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 5, huruf c adalah sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh: 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama

NO	KETENTUAN	URAIAN
		akreditasi internasional.
		IV. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		V. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
		VI. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
		VII. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.
		VIII. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		IX. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
		Catatan-4: A. Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, maka pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek. B. Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada Catatan-4, huruf A tidak bertindak dan berfungsi sebagai Importir, maka pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada Catatan-4, huruf A dapat dilakukan oleh perusahaan Importir yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Catatan-1, huruf b, angka 10.
2.	Sistem Manajemen Mutu Yang	Menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi SMM SNI

NO	KETENTUAN	URAIAN	
	Diterapkan	ISO 9001:2015 atau revisinya. • Pemenuhan persyaratan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat. • Sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 digantikan dengan surat pernyataan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.	
3.	Durasi Audit dan Pengambilan Contoh	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi waktu:	Jumlah minimal durasi waktu:
		I. Audit kecukupan, 1 <i>Mandays</i> (orang hari);	I. Audit kecukupan, 1 <i>Mandays</i> (orang hari);
		II. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro; dan	II. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 8 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro; dan
		III. pengambilan contoh, 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	III. pengambilan contoh, 1 <i>Mandays</i> (orang hari).
		Catatan-5: A. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau karantina. B. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambilan contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit. C. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
4.	Personil Auditor dan Petugas Pengambil Contoh	I. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;	
		II. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		III. lancar berbahasa Indonesia;
		IV. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
		V. telah di-registrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
		VI. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.
		Catatan-6: Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh dari laboratorium uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, maka persyaratan Petugas Pengambil Contoh mengacu kepada perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis.
5.	Laboratorium Uji yang Digunakan	I. Laboratorium uji yang digunakan:
		A. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
		B. Laboratorium Uji di luar negeri.
		II. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
		A. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
		B. ditunjuk oleh Menteri.
		III. Laboratorium Uji di luar negeri harus memiliki kemampuan melakukan pengujian sesuai dengan lingkup SNI untuk Pupuk NPK Padat dan memenuhi persyaratan:
		A. telah diakreditasi sesuai atau setara dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
		B. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
		C. ditunjuk oleh Menteri.
		IV. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:
		A. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
		B. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		C. lancar berbahasa Indonesia;
		D. memahami peraturan perundang-undangan; dan
		E. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
		V. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di luar negeri dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia.
TAHAP 2 : DETERMINASI		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	I. dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan;
		II. dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian); Dalam hal audit tahap 1 tidak dilakukan oleh perwakilan tim auditor yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit Kesesuaian), maka tim auditor dan LSPro harus dapat memastikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dilakukan audit tahap 2.
		III. melakukan tinjauan dokumen administrasi;
		IV. melakukan tinjauan dokumen (dokumen yang disampaikan melalui SIINas maupun dokumen yang disampaikan langsung kepada LSPro) terkait sistem manajemen mutu (bagi Produsen di Luar Negeri, dokumen ini wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia), antara lain:
		A. pedoman mutu;
		B. rencana mutu;
		C. proses bisnis;
		D. diagram alir proses produksi;
		E. daftar informasi terdokumentasi;
		F. laporan audit internal yang terakhir;
		G. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
		H. struktur organisasi;
		I. peta lokasi;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		J. daftar fasilitas produksi dan/atau perakitan; dan
		K. daftar peralatan uji.
		yang disediakan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan;
		V. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi);
		VI. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau perakitan berserta peralatan uji (yang digunakan untuk pengendalian mutu) yang dimiliki. (bagi Produsen luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia);
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	I. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1;
		II. Ketua tim harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;
		III. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Pupuk NPK Padat dan ruang lingkup lain sesuai keperluan audit. Dalam hal audit dilakukan oleh kelompok (tim), maka paling sedikit 1 (satu) orang dari kelompok (tim) auditor memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Pupuk NPK Padat;
		IV. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi Pupuk NPK Padat.
3.	Lingkup Yang Diaudit	I. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi;
		II. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis sesuai produk yang diajukan Sertifikasi SNI.
		III. Audit proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi.

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi:
		A. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi/perakitan;
		B. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
		C. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
		D. Pengendalian proses produksi/perakitan;
		E. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
		F. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi/perakitan (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
4.	Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	I. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis/bahan baku utama;
		II. Proses produksi/perakitan dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.
		III. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
		IV. Kalibrasi alat uji;
		V. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>);
		VI. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>); dan
		VII. Penandaan.
5.	Kategori Ketidaksesuaian	I. Mayor apabila:
		A. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu Pupuk NPK Padat sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau produsen Pupuk NPK Padat di luar negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau

NO	KETENTUAN	URAIAN
		B. ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
		II. Minor apabila:
		terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau produsen Pupuk NPK Padat di luar negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
6.	Pengambilan Contoh	I. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor;
		II. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU);
		III. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di tempat kedudukan dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
		IV. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal, surveilan atau sertifikasi ulang diatur sesuai dengan ketentuan pada “Huruf F Ketentuan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat ini.
		V. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		Catatan-7: A. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Perusahaan Industri sampai Sertifikat SNI diterbitkan. B. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Produsen di Luar Negeri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.
7.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian.	Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 2803:2024;
8.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI produk Pupuk NPK Padat.
TAHAP 3. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit Dan Laporan Hasil Uji	I. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait Pupuk NPK Padat;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		II. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		III. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Pupuk NPK Padat;
		IV. Ketentuan untuk hasil uji:
		A. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan <i>auditee</i> (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
		B. jika hasil uji ulang (sesuai huruf A) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk jenis produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
		C. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;
		D. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro;
		E. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan (huruf D) tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau
		F. dalam hal 1 (satu) jenis memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk jenis tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).
		Catatan-8: A. jika hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi; B. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang

NO	KETENTUAN	URAIAN
		setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. C. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi terkait proses penilaian kesesuaian, pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
		A. Penerbitan Sertifikat SNI; atau
		B. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI (pernyataan gagal memenuhi persyaratan SNI).
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	I. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan informasi hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas;
		II. Informasi hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka I paling sedikit berisi:
		A. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
		B. tanggal pelaksanaan audit kesesuaian;
		C. nama auditor;
		D. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
		E. nama petugas pengambil contoh;
		F. ringkasan hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;
		G. merek;
		H. komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;
		I. Laboratorium Uji yang digunakan;
		J. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya;
		K. laporan hasil uji yang meliputi:
		1. nomor dan judul SNI;
		2. tanggal penerimaan contoh uji;
		3. pelaksanaan pengujian;
		4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
		5. laporan hasil uji.
		III. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang

NO	KETENTUAN	URAIAN
		disampaikan oleh LSPro.
		IV. Evaluasi sebagaimana dimaksud angka III meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
		V. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
		VI. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		VII. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		VIII. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
		IX. Dalam hal LSPro:
		A. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
		B. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,
		Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
		X. Dalam hal:
		A. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
		B. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,
		Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
		XI. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
		XII. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
		XIII. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
		XIV. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Sertifikat SNI.	
		XV. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka XIV harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada angka XI oleh LSPro.	
		XVI. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		A. nama dan alamat Perusahaan Industri;	A. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
		B. merek;	B. merek;
		C. nomor dan judul SNI;	C. nomor dan judul SNI;
		D. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 5 (lima);	D. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 5 (lima);
		E. komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;	E. komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;
		F. daftar Pupuk NPK Padat yang disertifikasi;	F. daftar Pupuk NPK Padat yang disertifikasi;
		G. penerapan atau kepemilikan Sertifikat Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	G. penerapan atau kepemilikan Sertifikat Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
		H. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan	H. tanggal terbit Sertifikat SNI;
		I. masa berlaku Sertifikat SNI.	I. masa berlaku Sertifikat SNI.
			J. nama dan alamat Perwakilan Resmi;
			K. alamat gudang Perwakilan Resmi;
			L. nama dan alamat perusahaan Importir (dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir).
		XVII. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		A. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau	
		B. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		pemberi Maklun.
		XVIII. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
		A. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
		B. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
		XIX. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI;
		Catatan-9: A. Dalam hal terdapat Maklun atau Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI untuk merek yang dimaklunkan atau dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek. B. Maklun dapat dilakukan dengan persyaratan: 1. Untuk penerima Maklun. a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku, dan tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya sendiri dengan jenis Pupuk NPK Padat yang sama; dan b. penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Pupuk NPK Padat atas merek milik pemberi Maklun. 2. Untuk pemberi Maklun. a. pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha. 1) memiliki sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu); dan 2) memiliki akun SIInas. b. pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri. 1) memiliki sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu); dan 2) memiliki Perwakilan Perusahaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; C. Kerja Sama Merek dapat dilakukan dengan persyaratan:

NO	KETENTUAN	URAIAN
		1. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku, dan tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya masing masing dengan jenis Pupuk NPK Padat yang sama; 2. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Pupuk NPK Padat atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek. 3. 1 (satu) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada paling banyak 2 (dua) Perusahaan Industri dan/atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan 4. merek yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak hanya untuk 3 (tiga) merek. D. Sertifikat SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi. E. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI; F. Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan menggunakan: 1. merek milik sendiri, dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Pupuk NPK Padat; 2. merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun hanya berlaku untuk 1 (satu) merek untuk masing masing pemberi Maklun; atau 3. merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, berlaku untuk paling banyak 3 (tiga) merek untuk masing masing pemberi Kerja Sama Merek.
TAHAP 4. LISENSI		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	I. Pupuk NPK Padat yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
		II. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		III. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh:
		A. Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		B. Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri;
		C. Pelaku Usaha pemberi Maklun;
		D. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
		E. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
		F. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
		IV. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat untuk Merek milik sendiri, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf A atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, harus:
		A. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		B. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
		2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka IV, huruf B, angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada angka IV, huruf B, angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		V. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat untuk merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf C atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf D, harus:
		A. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		B. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		1. dalam hal penerima Maklun adalah Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi

NO	KETENTUAN	URAIAN
		dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
		2. dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.
		Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka V huruf B angka 1 atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada angka V huruf B angka 2 dikecualikan bagi Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		VI. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat untuk Merek Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf E atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf F, harus:
		A. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		B. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		1. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produk tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau
		2. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti

NO	KETENTUAN	URAIAN
		jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.
		Dokumen realisasi produk tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka VI huruf B angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada angka VI huruf B angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		VII. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		VIII. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		IX. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
		A. Badan; dan
		B. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk NPK Padat.
		X. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
		A. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
		B. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		XI. Dalam hal:
		A. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
		B. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung.
		tim meminta pemohon SPPT SNI (Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri, Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek) untuk memberikan klarifikasi.
		XII. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri

NO	KETENTUAN	URAIAN
		pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		XIII. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.
		XIV. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang mengajukan permohonan SPPT SNI:
		A. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
		B. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,
		Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
		XV. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		XVI. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
		A. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI telah sesuai, lengkap, dan benar; atau
		B. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,
		SPPT SNI akan diterbitkan oleh Kepala Badan.
		XVII. Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		XVIII. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		XIX. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:

NO	KETENTUAN	URAIAN
		A. informasi Sertifikat SNI;
		B. informasi produk; dan
		C. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.
		XX. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		XXI. Tata cara pengajuan permohonan SPPT SNI sebagaimana dimaksud angka IV sampai dengan angka XX berlaku pula untuk perpanjangan SPPT SNI.
		XXII. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik.
		XXIII. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada setiap kemasan terkecil dan/atau kemasan pajangan (<i>Display Packaging</i>) dari Pupuk NPK Padat dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
		XXIV. Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu Lampiran I huruf E Skema Sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
TAHAP 5 : SURVEILEN		
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	I. LSPro harus memastikan bahwa:
		A. Persyaratan sertifikasi masih berlaku;
		B. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan;
		C. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan: 1. bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat Merek; dan/atau 2. surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015, pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.
		II. Kegiatan Surveilen dan disertai dengan pengambilan contoh untuk pengujian produk

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;	
		III. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 atau revisinya, lingkup pelaksanaan audit dapat dilakukan pada elemen kritis.	
		Catatan-10: A. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, maka pada saat Surveilen kedua harus dipastikan telah memiliki sertifikat merek. B. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai pengganti sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal dan Surveilen satu, maka pada saat Surveilen kedua harus dipastikan telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.	
2.	Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi waktu:	
		I. audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro;	I. audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro;
		II. pengambilan contoh minimal 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	II. pengambilan contoh minimal 1 <i>Mandays</i> (orang hari).
		Catatan-11: A. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau karantina. B. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambilan contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit. C. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		dan/atau pengambilan contoh berikutnya.
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	I. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah di tutup/terselesaikan;
		II. Ketua tim harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;
		III. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Pupuk NPK Padat dan ruang lingkup lain sesuai keperluan audit. Dalam hal audit dilakukan oleh kelompok (tim), maka paling sedikit 1 (satu) orang dari kelompok (tim) auditor memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Pupuk NPK Padat;
		IV. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi Pupuk NPK Padat.
4.	Lingkup Yang Diaudit	I. Audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada saat survilen dilakukan pada elemen kritis sesuai proses;
		II. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis sesuai produk yang diajukan Sertifikasi SNI.
		III. Audit proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi:
		A. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi/perakitan;
		B. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
		C. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
		D. Pengendalian proses produksi/perakitan;
		E. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		F. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi/perakitan (termasuk kapasitas produksi per jenis untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
5.	Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	I. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis/bahan baku utama;
		II. Proses produksi/perakitan dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.
		III. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
		IV. Kalibrasi alat uji;
		V. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>);
		VI. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>); dan
		VII. Penandaan.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	I. Mayor apabila:
		A. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu Pupuk NPK Padat sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPPro dengan Perusahaan Industri atau produsen Pupuk NPK Padat di luar negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
		B. ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
		II. Minor apabila:
		terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau produsen Pupuk NPK Padat di luar negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	I. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		II. Suatu Pupuk NPK Padat termasuk dalam satu jenis jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut:
		A. merek;
		B. jenis Pupuk NPK Padat,; (kriteria kelompok adalah kelompok, perlu di carikan narasi yang tepat)
		A. Parameter uji.
		III. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU);
		IV. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di tempat kedudukan dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
		V. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal, surveilan atau sertifikasi ulang diatur sesuai dengan ketentuan pada “Huruf E Ketentuan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat ini.
		VI. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		Catatan-12: A. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Perusahaan Industri sampai Sertifikat SNI diterbitkan. B. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Produsen di Luar Negeri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.
8.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian.	I. Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 2803:2024;
9.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan masing masing SNI sesuai cangkupan pada produk.
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit Dan Laporan Hasil Uji	I. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait Pupuk NPK Padat;
		II. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		III. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Pupuk NPK Padat;
		IV. Ketentuan untuk hasil uji:

NO	KETENTUAN	URAIAN
		A. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan <i>auditee</i> (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
		B. jika hasil uji ulang (sesuai huruf A) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk jenis yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
		C. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro;
		D. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan (huruf D) tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau
		E. dalam hal 1 (satu) jenis memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk jenis tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).
		Catatan-13: A. jika hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi; B. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. C. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi terkait proses penilaian kesesuaian, pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

NO	KETENTUAN	URAIAN
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
		A. Sertifikat SNI dipertahankan;
		B. Sertifikat SNI dibekukan; atau
		C. Sertifikat SNI dicabut (tidak dapat dipertahankan).

- D. Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik
- 1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Pupuk NPK Padat yang memenuhi ketentuan SNI 2803:2024.
 - 2. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
 - 3. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) dilakukan pada setiap kemasan terkecil Pupuk NPK Padat dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca;
 - b) dilakukan dengan menempelkan *sticker* atau *printing* pada salah satu permukaan kemasan produk;
 - c) tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI;
 - d) penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 2803:2024; dan
 - e) selain tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
 - 1) nama produk dan nama dagang;
 - 2) berat bersih;
 - 3) nama dan alamat Perusahaan Industri;
 - 4) merek;
 - 5) komposisi;
 - 6) Nama dan alamat importir (produk impor)
 - 7) kode produksi; dan
 - 8) tulisan jangan digancu.
- E. Prosedur Pengambilan Contoh Uji
- 1. Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka sertifikasi, Surveilen, dan resertifikasi Sertifikat SNI.
 - 2. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Audit, perusahaan, dan Importir (jika ada).
 - 3. Jumlah contoh uji paling sedikit 3 (tiga) kg:
 - a. 1 kg untuk contoh uji;
 - b. 1 kg untuk arsip disimpan oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi;
 - c. 1 kg untuk contoh uji ulang .Apabila diperlukan pengujian ulang dapat menggunakan arsip contoh yang disimpan oleh Perusahaan Industri dan/atau produsen di luar negeri melalui Perwakilan Resmi.

F. Pengendalian Proses Produksi Pupuk NPK Padat

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus tersedia
2.	Bahan Baku	Pengujian/ <i>Certificate of Analysis</i>	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
3.	<i>Proses Produksi</i>	Sesuai fasilitas produksi perusahaan yang dimiliki	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
4.	<i>Quality Control (QC)</i> <i>Pengujian rutin</i>	1. Pengujian internal 2. Pengujian Eksternal yang telah terakreditasi oleh KAN atau yang setara	1. Kadar N,P dan K 2. Kadar air	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
5.	Kalibrasi/tera	Sesuai SOP perusahaan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
6.	Penanganan produk tidak sesuai	Sesuai SOP perusahaan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA